

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA BLITAR

Susi Ratnawati*

Abstract At the moment good governance paradigm is being discussed by everybody everywhere. Relevant MSDM must be fulfilled for the needs of good governance bureaucracy. On the other hand, understanding good governance is really complicated. Struggling the transparency and accountability in certain levels is not sufficient. The problem becomes more complicated when the demands of good governance need a change in various aspects related with all systems in operating the government, especially if the systems here have long been indoctrinated and specified with pathology characteristics.

The strategies of Good Governance implementation in Blitar city are as follows: First, observing the Capacity Building; Second, increasing Community Empowerment, and third, developing the transparency of public information and communication.

Kata kunci : Good Governance

Latar Belakang

Megawati ketika memberikan sambutan pada rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara tingkat nasional di Jakarta 11 Pebruari 2002, mengatakan bahwa "Saya ini memimpin pemerintahan yang saya sebut birokrasi keranjang sampah". Sebuah pernyataan jujur dari seorang Presiden. Apa yang tersirat dari pernyataan tersebut tidak lain adalah langkah awal yang dilakukan dalam rangka kritik tajam terhadap birokrasi pemerintahan, hal ini sebuah realitas seorang presiden, bahwa tak ada pilihan lain kecuali memimpin sebuah pemerintahan yang penuh kelemahan dan cacat. Hal itu lantaran perangai yang sombong, organisasi yang tambun, geraknya yang lambat, sifat korup, profesionalisme dan produktivitas yang rendah.

Berdasarkan dari segi teoritis, pernyataan Megawati bukanlah barang baru. Banyak pakar menguliti habis kualitas SDM birokrasi pemerintahan terutama sejak dekade tahun 1960. Warren Bannis, misalnya menyatakan bahwa pada abad 21 manusia tidak perlu birokrasi lagi, ada dua alasannya yaitu :

1. Birokrasi pemerintah sarat dengan kelemahan, seperti tidak efisien, mengedepankan struktur hierarchies, bertele-tele dan menyelewengkan tujuan.
2. Birokrasi pemerintah mengidap penyakit *inertia* (keterbelakangan) dan *resistensi* (menolak perubahan).

Bertolak dari kenyataan yang tengah melanda birokrasi Indonesia, maka perlu kiranya jajaran birokrasi segera merespon ungkapan Megawati tentang birokrasi keranjang sampah, dalam pengertian ikhtiar bersama untuk

* Susi Ratnawati adalah Dosen FISIP UBHARA

menemukan cara atau strategi memperbaiki birokrasi pemerintah. Upaya memperbaiki birokrasi pemerintah dari dekade ke dekade telah dilakukan, akan tetapi masih juga kandas pada sejumlah permasalahan klise, seperti tidak terkendalikannya penyimpangan dan penyelewengan, pegawai yang bersikap indisiplin, cara kerja yang tidak profesional, isu KKN, dan lain-lain. Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan, sehingga birokrasi menjadi kontraproduktif.

Ada banyak faktor yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, sehingga perlu sejumlah dimensi untuk menyelesaikan keadaan birokrasi yang coreng moreng tersebut. Langkah yang harus ditempuh bukan sekedar penyederhanaan struktur, melakukan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi saja, melainkan juga harus melihat sosok dan kompetensi SDM yang dimiliki oleh sejumlah instansi.

Desakan Untuk Perubahan Bagi Birokrasi

Terdapat beberapa faktor determinan yang mendorong birokrasi harus segera berbenah diri diantaranya :

1. Faktor reformasi Politik.

Reformasi politik setidaknya telah menimbulkan gelombang tuntutan yang dahsyat terhadap pemerintah untuk segera memperbaiki kinerjanya. Isu reformasi yang paling populer sekaligus menunjuk paling dalam di ulu hati para birokrat pemerintah adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Apa yang hendaknya dilakukan adalah untuk segera mengurangi atau bahkan menekan sampai seminimal mungkin kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi ironisnya di era yang katanya "Reformasi" ini kecenderungan ke arah korupsi, kolusi dan nepotisme justru malah tidak berkurang bahkan kecenderungan semakin menonjol. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat, tapi di daerah-daerahpun sejalan dengan otonomi daerah terjadi "New KKN" antara birokrat (eksekutif) dan anggota DPRD (legislatif).

2. Sistem ekonomi dunia yang semakin nyata menuju kearah globalisasi ekonomi.

Tekanan globalisasi ekonomi menuntut system birokrasi yang lebih fleksibel, responsive terhadap tuntutan konsumen dan yang paling penting adalah tidak menghambat arus pergerakan barang, modal dan manusia yang semakin hari semakin cepat. Kenyataanya selama ini birokrasi justru dilatih untuk memperlambat segala macam urusan yang berhubungan dengan birokrasi dengan alasan prosedur baku atau ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus semacam ini menjadikan alasan banyak orang malas berurusan dengan birokrasi, biasanya berkutat pada persoalan tentang kerumitan prosedur yang harus ditempuh, kemudian menimbulkan biaya-biaya siluman yang memberatkan masyarakat itu sendiri. Akibatnya aktivitas pelayanan birokrasi berkembang ke arah pasar gelap (*black market*) yang merupakan konsekuensi logis dari tidak

jelas dan tidak pastinya pelayanan yang diberikan. Fenomena persoalan pada hampir semua unit pelayanan birokrasi merupakan gejala umum yang tidak terhindarkan.

3. Faktor Otonomi Daerah telah memunculkan permasalahan.

Otonomi daerah disamping menimbulkan harapan sekaligus tantangan bagi birokrasi pemerintahan. Tantangan yang paling penting bersumber dari persoalan perubahan perilaku birokrasi itu sendiri. Pada era sentralistik, birokrasi (lokal) hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi nasional yang terpusat di Jakarta. Artinya segala inisiatif kebijakan, kecuali dalam bentuk yang sangat terbatas, diputuskan di Jakarta, daerah hanya terbatas sebagai pelaksana. Pada era otonomi daerah birokrasi lokal secara tiba-tiba harus memainkan peranan sebagai pengambil inisiatif kebijakan yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan lokal dan kemampuan lokal untuk membiayainya. Hal ini tentu saja tidak mudah karena perubahan dari pelaksana menjadi pengambil inisiatif menuntut sejumlah keahlian baru yang tidak sederhana pula.

Aparatur pemerintah yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme yang gejala ini nampaknya tidak berakhir walau kekuasaan monolitik Orde Baru dianggap "tumbang". Tetap saja dimasa yang katanya reformasi ini proses korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi, malah diindikasikan bertambah marak dan subur.

Ruang Lingkup

Dilatar belakangi oleh pemahaman diatas, Pemerintah Kota Blitar sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, mencoba menempatkan diri sebagai pemain yang secara aktif ikut serta menentukan setting atau desain manajemen Pemerintahan daerahnya sendiri atas dasar norma dan aturan dasar yang telah ditentukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah kota Blitar akan mendesain organisasi Pemerintah kota Blitar menjadi birokrasi yang ramping, sederhana dan miskin struktur tapi kaya fungsi melalui penerapan kebijakan reformasi internal birokrasi Pemerintahan Daerah sebagai anchor issue yang diharapkan dapat dijadikan tonggak pembaharuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ruang lingkup kajian dalam tulisan ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara riil oleh Pemerintah kota Blitar sekaligus berbagai upaya penanganannya yang dalam pengembangannya meliputi aspek kualitas sumber daya manusia (pegawai), kinerja lembaga-lembaga perangkat daerah dan budaya kerja birokrasi Pemerintahan Daerah.

Masalah Yang Dihadapi

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Blitar didalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah adalah bersumber dari :

1. Kondisi Personal.
 - a. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas
 - b. Mentalitas birokrasi yang masih kental dengan pendekatan pangreh projo dan feodalistik.
 - c. Budaya kerja yang cenderung santai dan alergi terhadap suasana kompetitif dan keterbukaan.
2. Kondisi Kelembagaan
 - a. Organisasi pemerintah daerah masih belum mempunyai keberanian untuk mandiri, dalam arti masih selalu bergantung kepada petunjuk, pedoman dan arahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - b. Kelembagaan pemerintah daerah masih cenderung gemuk, lamban, inefisien, in efektif dan tertutup.
 - c. Budaya kerja yang cenderung santai dan alergi terhadap suasana kompetitif dan keterbukaan. (Djarot Saiful Hidayat : 2004)

Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi serta untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sementara definisi *good governance* menurut World Bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solit dan bertanggung-jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002 : 23).

Kehadiran *good governance* ditandai oleh terbentuknya “kemitraan” antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha serta individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggungjawab. Istilah *governance*, *good governance* dan *good public governance* menjadi populer dalam kurun waktu 1996 – 1997 karena banyak diperkenalkan oleh lembaga pemberi bantuan luar negeri (*foreign donor agencies*) baik yang bersifat multilateral maupun bilateral (Word Bank, 1994).

Dari uraian diatas, *governance* merujuk pada tiga pilar yakni : *public governance* merujuk pada lembaga pemerintah, *corporate governance* merujuk pada pihak swasta/dunia usaha, dan *civil society* (masyarakat sipil). Untuk mewujudkan *good governance*, upaya pembenahan pada salah satu

pilar harus dibarengi dengan pembenahan pada berbagai pilar lainnya secara serentak dan seimbang. Kebaruan konsep dan prinsip *governance*, *accountability*, dan *stakeholders* justru menyadarkan kita semua akan pentingnya upaya-upaya untuk segera memasyarakatkannya secara luas. *Governance* harus segera disosialisasikan keseluruh warga masyarakat Indonesia untuk menciptakan generasi baru bangsa yang besar. Jadi *Good Governance* Adalah Tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang didalamnya terdapat keseimbangan peran dan fungsi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah :

1. Partisipasi

Mendorong setiap warga negara untuk mempergunakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penegakan hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5. Cepat Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

6. Wawasan kedepan

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas, dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. Efisiensi dan Efektifitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang terasedia secara optimal dan bertanggung jawab.

10. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Peluang, Tantangan dan Ancaman

Peluang :

Dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang melibatkan seluruh domein : a) Terdapat pembagian peran dan fungsi yang seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat; b) Akan terbuka kesempatan seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan bersama; c) Pemerintah tidak lagi bertindak secara one man show atau berfungsi sebagai satu-satunya *agent of development* tetapi lebih kepada *agent of change*.

Tantangan :

Dari Sisi Pemerintah : a) Diperlukan kesiapan SDM aparat; b) Harus dilaksanakan bersamaan dengan Capacity Building Pemerintah Daerah; c) Memerlukan kesepahaman dan komitmen yang kuat dari segala jajaran birokrasi Pemerintah Daerah.

Dari Sisi Swasta : a) Diperlukan suasana usaha yang kondusif; b) Membutuhkan pelaku-pelaku usaha yang berorientasi kepada kepentingan jangka panjang.

Dari Sisi Masyarakat : a) Membutuhkan kedewasaan berpikir dari potensi masyarakat (LSM/ORNOP/NGO); b) Membutuhkan komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bersama (bangsa dan masyarakat luas).

Ancaman :

Dari Sisi Pemerintah : a) Proses Capacity building Pemerintah Daerah belum tuntas (Personal, Institusi, Keuangan, Piranti Hukum, Sarana dan Prasarana, Net Working); b) Belum kuatnya komitmen segenap jajaran birokrasi Pemerintah Daerah terhadap "*Peran Baru*" yang disandang oleh Pemda.

Dari Sisi Swasta : a) Pelaku-pelaku usaha masih berorientasi jangka pendek dan kurang memperhitungkan perkembangan global; b) Suasana usaha masih belum memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berkembangnya pengusaha kecil dan menengah.

Dari Sisi Masyarakat : a) Sebagian besar potensi masyarakat (LSM, Ormas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan formal maupun formal) masih terbawa oleh euphoria reformasi; b) Orientasi perjuangan masih lebih condong kepada kepentingan politik praktis dan cenderung mengabaikan kepentingan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Strategi Penerapan Good Governance Di Kota Blitar

Adapun strategi penerapan *Good Governance* di Kota Blitar adalah sebagai berikut : (1) Melakukan Capacity Building. (2) Meningkatkan *Counity Empowerment*. (3) Mengembangkan transparansi informasi dan komunikasi publik.

Implementasi Program dan Kegiatan :

a. Capacity Building

- Penataan kelembagaan
- Penyesuaian peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Personal berdasar Capabilitas dan Akseptabilitas secara proporsional.
- Peningkatan kualitas SDM dan perubahan cara berpikir (mind set) birokrat pemerintahan dari Pangreh Projo menjadi Pelayan Masyarakat.
- Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Meningkatkan Community Empowerment

- Memperkuat peran serta masyarakat melalui LPMK (Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan) dan potensi swasta dan institusi-institusi kemasyarakatan lainnya.
- Melibatkan secara langsung masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui program *Block Grant*.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya aspirasi dan apresiasi kemasyarakatan dalam proses penentuan kebijakan daerah melalui program CDS.
- Menampung dan mengarahkan potensi pemikiran masyarakat kedalam forum kerja Stakeholders (TKS)

c. Mengembangkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

- Membuka situs resmi Pemerintah Kota Blitar ([www. Blitar.co.id](http://www.Blitar.co.id)) sebagai media komunikasi dan kontrol masyarakat.
- Mengembangkan komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media Talk Show di Radio-radio dan media Massa lainnya.
- Mengembangkan sitem manajemen pelayanan satu atap sebagai komitmen atas transparansi pelayanan publik.

Kebijakan Pembangunan

a. Good Governance

- Perubahan proses pembangunan mengedepankan partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.
- Penerbitan peraturan Daerah tentang transparansi
- Optimalisasi partisipasi masyarakat
- Peningkatan peran wanita
- Peningkatan dana stimulan dan menyerahkan psarana mikro kepada kelurahan.

b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

- Pariwisata
- Sentra industri kerajinan kayu
- Industri makanan olahan
- Perikanan air tawar
- Agrowisata dan bisnis

- Pusat pendidikan (kota pendidikan)
- Pusat pelayanan kesehatan spesialis
- Pusat jasa dan perdagangan
- Permukiman pekerja perkotaan
- c. Pengentasan kemiskinan
 - Keterpaduan instansi
 - Keterampilan yang berkelanjutan
 - Penataan PK5
 - Perbaikan sanitasi
 - Pemanfaatan lahan pekarangan
 - Penertiban penduduk dan pekerja musiman
- e. Pelayanan umum
 - Peningkatan sarana transportasi
 - Pelayanan air bersih (PDAM)
 - Sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar
 - Sanitasi lingkungan
 - Sarana kesenian dan olah raga
 - Sarana irigasi
 - Sarana rekreasi

Simpulan.

1. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penerapan Good Governance di Kota Blitar antara lain adalah : Pertama, Adanya tantangan Globalisasi, khususnya yang berkaitan dengan pasar bebas dan kepentingan negara-negara donor. Kedua, Kondisi faktuil birokrasi pemerintahan yang kurang sehat. Ketiga, Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan haknya didalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kota Blitar antara lain, kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan fasilitas umum, masalah sosial ekonomi dan kemiskinan masih dominan, pengelolaan potensi daerah yang belum optimal, kualitas permukiman kawasan pinggiran yang belum tertata.
3. Strategi penerapan Good Governance di Kota Blitar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, dengan melakukan Capacity Building. Kedua, Meningkatkan Community Empowerment. Dan Ketiga, mengembangkan transparansi informasi dan komunikasi public.

Saran-Saran

1. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM sebagai asset utama pembangunan, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan, seyogyanya pendidikan itu merata di rasakan oleh masyarakat, jadi bukan hanya untuk mereka yang mampu saja.

2. Pengentasan kemiskinan juga harus diperhatikan, karena kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan.
3. Kebijakan-kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan.

Daftar Rujukan

- , "Prioritaskan Good Governance dengan pembangunan berkelanjutan", Kompas, 12 Juni 1999, Jakarta
- Darwin, Muhajir, 1996, *Pengembangan Aparatur Pemerintah Indonesia*, dalam Riza Noor Arfani, *Pelebagaan Demokrasi di Indonesia*, PPSK kerjasama dengan Rajawali Pers, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offse, Yogyakarta.
- Pratikno, 1997, *Pendalaman Materi Bidang Tugas untuk DPRD Tingkat I dan II*, yogyakarta.
- Saiful H., Djarot, "*Perampingan Birokrasi dalam usaha Peningkatan Kinerja di Kota Blitar*", Makalah disampaikan pada seminar Nasional "Penataan Birokrasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah FIA-UPN "Veteran" Jawa Timur, 14 Januari 2004.
- Saiful H., Djarot, "*Manajemen Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penataan Kelembagaan di Pemerintah Kota Blitar*", Disampaikan dalam ceramah umum penerimaan kuliah kerjasama Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, Selasa 16 Maret 2004.
- Teguh Sulistiyani, *Ambar*, 2004, "*Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*", Gava Media, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- World Bank, 1994.